

PROSIDING SEMINAR NASIONAL *CALL FOR PAPER*

Membangun dan Meningkatkan
Daya Saing Nasional Di Era
Keterbukaan Ekonomi



YOGYAKARTA, 16-18 NOVEMBER 2011

Buku 2

Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS EKONOMI UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta	iv
Daftar Isi	vii
 BUKU 1 : MONETER, FISKAL, PERBANKAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
 PERAN KEPABEANAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI INDONESIA	
Roberto Akyuwen dan Budi Nugroho	1
 MEMBANGUN DAYA SAING GULA DI JAWA TIMUR MEMASUKI ERDAGANGAN BEBAS MELALUI PENINGKATAN RENDEMEN (Analisis Daya Saing Dengan Pendekatan Policy Analisis Matriks)	
Agus Santosa	18
 PENGEMBANGAN MODEL SISTEM DINAMIS DI PT UTAMA RASA SEJAHTERA (La Viola!), JAKARTA SELATAN	
Haryadi Sarjono & Giansia Dara Ayunda	40
 ANALISIS ROI USAHA TRAKTOR DAN POTENSI SUBSIDI MESIN TRAKTOR SEBAGAI PENGGANTI SUBSIDI PUPUK	
Sri Hanggana Suyatman	66
 Evaluasi Hubungan UMKM dengan Lembaga Keuangan Bank: Sebuah Tinjauan Perspektif dengan Pendekatan <i>Brand Personality</i> pada BPD DIY	
Carolina Yulia Tri Prasetyani & Andhy Setyawan	82
 Perdagangan Bebas dan Daya Saing Nasional: Dilema Komoditas Beras	
Veny Anindya Puspitasari & Apriani Simatupang	88
 ANALISIS PERUBAHAN STRATEGI PERDAGANGAN DAN BISNIS BERBASIS <i>E-COMMERCE</i>	
Sugeng Winardi	100

PERAN PAJAK DALAM membangun dan mendorong peningkatan daya saing UMKM Rd. Tatan Jaka Tresnajaya & Aniek Juliarni	110
ANALISIS EKSPOR KOMODITI UNGGULAN SULAWESI SELATAN DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA Abd Rahman Razak	129
Peranan Budaya Terhadap Peningkatan Daya Saing Pariwisata Propinsi Bali 1985-2010 I Ketut Nama	141
PENGARUH MARKET ORIENTATION TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA INDUSTRI KECIL BATIK PENGARUH MARKET ORIENTATION TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA INDUSTRI KECIL BATIK Erwin Arie Perwoso & Budi Suprpto	155
STRATEGI MANUFAKTUR DAN KINERJA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN PADA INDUSTRI DI SULAWESI SELATAN Maat Pono	162
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KECAMATAN Studi Kasus Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 2004-2007 Jamzani Sodik	173
Energi Indonesia Sebagai Kekuatan Energi Dunia? : Sebuah Analisis Intertemporal Veny Anindya Puspitasari	193
DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Astuti Rahayu	208
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) Budiarto	218
PRODUKSI MINYAK BUMI DAN GAS ALAM INDONESIA DI ERA KETERBUKAAN EKONOMI Sultan	225

KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL Sri Suharsih & Ari Dwi Priyanto	235
TINJAUAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA KETERBUKAAN EKONOMI Diah Lufti Wijayanti	257
KINERJA DAN DAYA SAING EKSPOR INDONESIA (STUDI KASUS KOMODITI KOPI, TEH DAN REMPAH-REMPAH- KODE HS 09- KE ASEAN) Sri Rahayu Budi Hastuti	267
PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DIY BERBASIS POTENSI DAERAH DAN CLUSTER Akhmad Syari'udin & Rini Dwi Astuti	277
PROSPEK PENDIRIAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT UMKM DI DIY Ardito Bhinadi & Rini Dwi Astuti	295
BUKU 2 : INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN, KNOWLEDGE MANAGEMENT, OPERATION STRATEGIC, MARKETING STRATEGIC, HRM STRATEGIC DAN FINANCE STRATEGIC	
PENGUATAN KOPERASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING EKONOMI NASIONAL DI ERA KETERBUKAAN EKONOMI Mujino	1
PENGARUH PEMILIHAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: <i>Studi Empirik pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i> Agung Satmoko & C. Ambar Pujiharjanto	22

MENGEJAR KEMANDIRIAN UNTUK MEMBANGUN DAYA SAING NASIONAL

Didit Herlianto

41 ✓

PERAN LEADER EMOTIONAL EXPRESSIVE DALAM MEMODERASI PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN VISIONER TERHADAP KESIAPAN INDIVIDU UNTUK BERUBAH (Studi pada Industri Rumah Tangga di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)

Yuni Siswanti

56

JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) SEBAGAI PENERAPAN ONE MONETARY UNIT FOR ONE REAL ASSET (OMNIFORA) UNTUK MEMINIMALISASI PRAKTEK DERIVATIF : Sebuah Upaya Revitalisasi Perekonomian Berbasis Direct Financing for Direct Investment (DEVIDEN)

Noer Kholis & Ido Wicaksono

74

STRATEGI MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN MANUFAKTUR SKALA KECIL MENENGAH DI INDONESIA :

Pendekatan Berbasis Sumber Daya

Lena Ellita & Teodora Winda Mulia

94

PENGEMBANGAN PASAR PRODUK SYRUP CARICA MEREK "SUNRISE" MELALUI PRODUK DAN KOMUNIKASI PEMASARAN

Eny Endah Pujiastuti, Suratna & Muh Edy Susilo

129

PERBANDINGAN KARAKTERISTIK BERDASARKAN GENDER ANTARA WIRUSAHA PRIA DAN WANITA

Franky Slamet & Tommy Setiawan Ruslim

146

BAGAIMANA REAKSI PERUSAHAAN YANG MENDAPAT SERUAN BOIKOT ? : Sebuah Penelitian Kasus

Kresno Agus Hendarto

158

PERAN WALABA BAGI PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN IMKM (Ditinjau dari Aspek Hukum)

Siti Sumartilah

174

KAJIAN KAPASITAS UKM DALAM PENYERAPAN DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DALAM RANGKA ,EMINGKATKAN KAPABILITAS INOVASI

Titik Kusmantini & AYN Warsiki	192
PROSES PEMBELAJARAN MENJADI WIRUSAHA KECIL DI KABUPATEN BANTUL Indah Widowati	220
MEMBANGUN VALUE-BASED MARKETING SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN DAYA SAING BERKELANJUTAN Surpiko Hapsoro Darpito	228
PROSPEK BISNIS JAMUR DALAM BINGKAU KEMITRAAN : Kasus di Sanggar Tani Media Agro Merapi Teguh Kismantoroadji	242
PERENCANAAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN DI PT. MEGATAMA MULTITEKNIKA ABADI Haryadi Sarjono & Hanny Fransiska Meisa	251
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JIWA BERWIRUSAHA MAHASISWA DI JAKARTA Novita Wahyu Setyowati & Tonny Hendartono	259
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKSANAAN PENDANAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Sri Hermuningsih & Dewi Kusuma Wardani	267
CULTURAL AND SITUATION ANALYSIS IN THE CARRIBEAN'S RESORT IN BRITISH IRRGIN ISLAND Muhammad Idrus Taba & Julius Jillbert	279
KAJIAN KAPASITAS INOVASI UKM BATIK DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENCIPTAAN KEUNGGULAN BERSAING YANG BERKELANJUTAN Aris Kusumo Diantoro & Titik Kusmantini	292

EVALUASI KEPUTUSAN INVENTORY MANAGEMENT DAN INVENTORY BALANCING PADA SAYUR SEGAR DI BEBERAPA SUPPLIER DI YOGYAKARTA	
Dinovita Ayu Kusuma Putri, Adi Djoko Guritno & Endy Suwondo	310
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA BAGIAN PRODUKSI DAN BAGIAN PEMASARAN DIVISI NATURAL BAGS LUNAR CIPTA KREASII (Sleman - Yogyakarta)	
Annisa Ramadhani, Suharno & Novita Erma Kristanti	328
PENILAIAN TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR DALAM KINERJA SUPPLY CHAIN PADA PRODUK SAYURAN SEGAR BERDASARKAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE (SCOR)	
Rika Fuji, Adi Djoko Guritno & Endy Suwondo	346
ANALISIS POTENSI DAYA SAING ARIWISATA DI JATIM	
Yessi Artanti & Dewie Triwijayanti	362
 BUKU 3 : CSR, ETAP, GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
PENGARUH MEKANISME <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 - 2010	
Tri Wahyu Adi & Fifi Swandari	1
TATA KELOLA NEGARA DAN SAHAM LEVEL PERTAMA (STUDI PADA INDUSTRI CONSUMER GOODS DI NEGARA-NEGARA ASEAN)	
Sujatmika & Sri Suryaningsum	18
PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	
Bambang Suropto	42
PENGARUH <i>INVESTMENT OPPORTUNITY SET</i> (IOS) TERHADAP <i>DISCLOSURE</i> LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN LQ45	
Sri Hermuningsih	68

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI SELF ASSESSMENT SYSTEM (STUDI PADA PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAFTAR DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL)	
Sucahyo Heriningsih, Ichsan Setiyo Budi & Fendy Ferdiansyah	80
PENGEMBANGAN METODE BELAJAR-CEPAT AKUNTANSI: LANGKAH AWAL PENINGKATAN DAYA SAING UMKM	
Tomy G. Soemapradja & Holly Deviarti	95
PENGUNGKAPAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN: SUATU DESKRIPSI	
Sri Astuti, Kusharyanti & Ridha Priyanto	115
KAITAN INDEKS RISIKO NEGARA DENGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	
Didi Achjari & Sri Suryaningsum	135
PROSES BELAJAR AKUNTANSI: PERSAMAAN AKUNTANSI vs PERSAMAAN MATEMATIKA?	
Sri Suryaningsum	157
POLA <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR) PERUSAHAAN BAGI PENGEMBANGAN UMKM DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT	
Sujatmika	169
KESESUAIAN INDIVIDU DENGAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI (SUATU PROPOSISI)	
Pribadi Widyatmojo	175
ANALISIS PENGARUH <i>INSTITUTIONAL SHAREHOLDER</i> TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN : PENDEKATAN <i>TAX BASED HYPOTHESIS</i> DAN <i>AGENCY COST BASED HYPOTHESIS</i>	
Khoirul Hikmah	198

STUDENTS ENTREPRENEURIAL INTENTION: STUDI PERBANDINGAN ANTARA PRODI AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN STUDI PEMBANGUNAN DI FE UPN V YOGYAKARTA R Heru Kristanto HC	216
THE HISTORICAL OF ENTREPRENEURSHIP: TO EXAMINE THE ENTREPRENEURIAL REVOLUTION TAKING PLACE TODAY M. Irhas Effendi & Heru Kristanto HC	232
PERBEDAAN PERILAKU MAHASISWA PRODI MANAJEMEN BIDANG MINAT KEUANGAN & NON KEUANGAN PADA PRAKTIKUM PASAR MODAL Heru Tri Sutiono & Sri Isworo Ediningsih	244
ANALISIS <i>SWITCHING COST</i> SEBAGAI UPAYA PERUSAHAAN DALAM PENCIPTAAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PENGGUNA HAND PHONE MEREK NOKIA DI YOGYAKARTA Sugiyanto	257
ANALISIS FUNDAMENTAL DALAM MEMPREDIKSI <i>RETURN SAHAM</i> PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM INDEKS LQ 45 Hendro Widjanarko & Fachrul Reza A.	276
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI <i>DIVIDEND PAYOUT RATIO</i> PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Nilmawati	294
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, <i>LEVERAGE</i> DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY Lita Yulita Fitriyani, Sri Wahyuni Widiastuti & Desy Magdalena Leiwakabessy	310
EXPLORING TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS IN YOGYAKARTA Ratna Roostika	329

MENGEJAR KEMANDIRIAN UNTUK MEMBANGUN DAYA SAING NASIONAL

Didit Herlianto

Dosen Prodi Manajemen FE UPN "Veteran" Yogyakarta

E-mail: diditgatra@yahoo.co.id

Abstract

In Global report The Competitiveness Report 2011-2012 released by World Economic Forum (WEF), rankings of Indonesian competitiveness alight from the rankings 44 in the year 2010 becoming 46 year 2011 from 142 state. Even experience of the degradation, but Indonesian remain to be assumed to have the good enough performance among nations ASEAN, after Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam and Thailand. Governmental Role in creating national competitiveness very needed. To increase governmental national competitiveness of priority require to finish the big problems intensity able to pursue the national competitiveness that is corruption and inefficient government bureaucracy. From other side the governmental mentioned need also pursue independence all relevant area with the pillar in improving national competitiveness. Real correct independence do not fall in economic isolationisme or refuse the international economic interdependensi. There are some step real which must can be taken to increase national competitiveness that is: 1) domestic optimum market; 2) priority of allocation energi to domestic industrial importance; 3) improving productivity in industrial storey level; 4) design of incentive system in developing industrial bases of national; 5) enlarging support from financial sector to domestic industry; 6) improving industrial ability; 7) independence develop build the availibility of infrastructure; 8) lifting status of middle and small micro effort perpetrator independence; 9) economics distribution which with justice to each every area; and 10) have to have the high *commitment* to pursue the independence in developing national competitiveness from all nation element namely government, self-supporting institute of society, strength of society civil, parliament, enforcer punish, financial institution, and perpetrator is effort.

Keywords: *independence, national competitiveness, world economic forum.*

I. PENDAHULUAN

Dalam laporan *The Global Competitiveness Report 2011-2012* yang dikeluarkan *World Economic Forum (WEF)*, peringkat daya saing Indonesia turun dari peringkat 44 pada tahun 2010 menjadi 46 tahun 2011 dari 142 negara. Penurunan peringkat daya saing Indonesia tahun ini menunjukkan perbaikan daya saing yang dilakukan pemerintah tidak stabil, padahal laporan WEF tahun 2009-2010 daya saing Indonesia mampu naik dari peringkat ke-54 menjadi ke-44. *World Economic Forum*, menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu adalah forum yang cukup dipandang di dunia dengan jumlah anggota sebagian besar adalah perusahaan ternama, sehingga forum itu akan menjadi referensi bagi perusahaan maupun negara-negara di dunia untuk berinvestasi. Ketika baru masuk, Indonesia *ranking* 69, kalau mau diukur dari 69 ke 46 sudah banyak perbaikan, ujanya. Meskipun demikian pemerintah sadar masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan seperti infrastruktur. Justru di satu sisi adalah hambatan, tapi di sisi lain infrastruktur itu peluang investasi kata Mendag. Untuk meningkatkan kembali peringkat daya saing Indonesia, pemerintah sudah dan sedang melakukan upaya-upaya agar investasi serta perdagangan tidak ikut menurun. Perbaikan dalam hal infrastruktur yaitu bagaimana meningkatkan kerja sama publik dan pemerintah (*Public-Private Partnership*) serta pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain itu yang harus diperbaiki berikutnya adalah lembaga pemerintah terutama yang menjadi prioritas, yakni reformasi birokrasi. Meski mengalami penurunan, namun Indonesia tetap dianggap memiliki kinerja cukup baik di antara negara-negara ASEAN, setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Penurunan daya saing Indonesia juga disebabkan oleh faktor birokrasi yang dinilai masih berbelit sehingga dapat menghambat laju investasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tingkat korupsi masih ruwet.

Pengalaman sejumlah negara seperti Finlandia, Singapura, China, Jepang, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa pembangunan daya saing nasional sangatlah kompleks dan membutuhkan jangka waktu lama. Namun pengalaman mereka dalam beberapa hal bisa kita petik menjadi pelajaran berharga. Negara-negara tersebut mampu mengubah *herited-competitiveness* menjadi *created-competitiveness*. Daya saing tidak lagi bergantung pada ketersediaan dan berlimpahnya sumber daya alam. Negara-negara tersebut mampu keluar dan mengubah minimnya kekayaan alam menjadi kemampuan berinovasi untuk menghasilkan produk dan jasa bernilai tinggi. Semua elemen bangsa tidak terkecuali pemerintah, parlemen, dan pelaku usaha bersama-sama membangun sistem yang transparan, holistik, efisien, dan mengedepankan aspek keterkaitan industri pusat-daerah. Bagi Indonesia hal ini menjadi penting dilakukan lantaran kebijakan desentralisasi berpotensi membuat

arah industri tidak fokus. Secara nasional pemerintah harus mampu mendesain sistem insentif dalam hal start-up bisnis, inovasi, investasi, kemudahan perizinan, prosedur ekspor, dan insentif pajak dalam membangun basis industri nasional. Birokrat harus mampu bekerja secara efisien dan inovatif untuk mencari solusi dan perlu juga adanya semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap pemilihan industri prioritas. Keterkaitan antara industri besar-menengah dan UMKM perlu dijaga agar pemerataan pembangunan tercipta. Disamping itu faktor kemandirian industri nasional harus dikedepankan untuk dapat mengejar ketertinggalan dengan industri negara lain. Relevan dengan hal tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas bagaimana mengejar kemandirian untuk membangun daya saing nasional di era keterbukaan ekonomi.

II. DESKRIPSI DAYA SAING INDONESIA

World Economic Forum (WEF) kembali mempublikasikan laporan tahunan mengenai daya saing global, yaitu *The Global Competitiveness Report 2011-2012*. *Competitiveness* suatu negara di dunia diukur dari dua belas pilar indikator, melalui apa yang disebut sebagai *Global Competitiveness Index* (GCI). Kedua belas indikator tersebut yakni institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan, efisiensi produk, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar, teknologi, target pasar, keandalan bisnis, serta inovasi. Penggabungan dua belas pilar ini akan meningkatkan daya saing dan keterkenalan suatu produk negara di dunia. Keterkenalan yang membuahkan kepercayaan pasar tersebut kemudian akan memacu pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi ekspor maupun investasi. Laporan GCI 2011-2012 disusun pada saat ekonomi dunia mengalami berbagai tantangan. Krisis ekonomi dunia memang sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun ada beberapa negara yang berada pada puncak krisisnya seperti Yunani dan beberapa negara Eropa lain. AS juga sedang mengalami pertumbuhan yang menurun dengan tingkat pengangguran yang tinggi, demikian juga Jepang, yang pada beberapa bulan lalu mengalami bencana alam yang dahsyat. Negara-negara berkembang pada umumnya lebih bernaesib baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 6%/tahun. WEF berharap agar dokumen yang rutin dipublikasikan setiap tahun, sejak 30 tahun yang lalu ini mempermudah penilaian potensi produktivitas di setiap negara. Dengan menyajikan berbagai faktor kunci pendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat dipahami mengapa suatu negara dapat lebih berhasil dibandingkan negara lain dalam meningkatkan pendapatannya. Dengan kata lain, laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun rencana kebijakan ekonomi nasional suatu negara. Laporan WEF menghimpun data-data ekonomi dari 142 negara, dimana data-data ekonomi tersebut diolah untuk menghasilkan peringkat daya saing negara-negara. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor

yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara. Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing yang tinggi, dan daya saing yang tinggi berpotensi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tahun ini peringkat daya saing dunia urutan 10 teratas masih didominasi oleh negara-negara Eropa. Swiss negara paling kompetitif di dunia, disusul oleh Singapura, Swedia, Finlandia (Lihat Tabel 1). Jepang adalah negara Asia ke 2 setelah Singapura yang menempati posisi sepuluh besar. AS berada pada posisi ke 5 dan Inggris pada posisi ke 10. Pada tahun ini, Indonesia menempati posisi ke 46, turun dua tingkat dari tahun 2010. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya peringkat daya saing Italia (43), Lithuania (44) dan Portugal (45), serta turunnya peringkat Siprus (dari 40 menjadi 57). Diantara negara-negara ASEAN (Lihat Tabel 2), posisi Indonesia di bawah Singapura (peringkat ke 2), Malaysia (peringkat ke 21), Brunei Darussalam (peringkat ke 28), dan Thailand (peringkat ke 39). Sedangkan Vietnam, Filipina dan Timor-Leste berada di belakang Indonesia, yaitu peringkat ke 65, peringkat ke 75 dan peringkat ke 131. Jika dilihat dari perubahan peringkat negara-negara ASEAN dari tahun 2010 ke tahun 2011 (Lihat Tabel 3), Filipina cukup mengejutkan karena tahun 2011 naik 10 tingkat dari peringkat ke 85 tahun 2010, Malaysia naik 5 tingkat, Timor-Leste naik 2 tingkat, Singapura naik 1 tingkat dan Brunei Darussalam tetap, sedangkan yang mengalami penurunan peringkat cukup tajam Vietnam yaitu turun 6 tingkat disusul Indonesia 2 tingkat dan Thailand 1 tingkat.

Tabel 1. Sepuluh Negara Berdaya Saing Tertinggi Tahun 2011

Negara	Ranking	Score
Swiss	1	5,74
Singapura	2	5,63
Swedia	3	5,61
Finlandia	4	5,47
AS	5	5,43
Jerman	6	5,41
Belanda	7	5,41
Denmark	8	5,40
Jepang	9	5,40
Inggris	10	5,39

Sumber: *World Economic Forum 2011*

Tabel 2. Peringkat Daya Saing Negara ASEAN Tahun 2011

Negara	Ranking	Score
Singapura	2	5,63
Malaysia	21	5,08
Brunei Darussalam	28	4,78
Thailand	39	4,52
Indonesia	46	4,38
Vietnam	65	4,24
Filipina	75	4,08
Timor-Leste	131	3,35

Sumber: *World Economic Forum 2011*

Tabel 3. Perubahan Peringkat Daya Saing Negara ASEAN Tahun 2011

Negara	Ranking 2011	Ranking 2010	Perubahan
Singapura	2	3	1
Malaysia	21	26	5
Brunei Darussalam	28	28	0
Thailand	39	38	-1
Indonesia	46	44	-2
Vietnam	65	59	-6
Filipina	75	85	10
Timor-Leste	131	133	2

Sumber: *World Economic Forum 2011*

Penurunan peringkat daya saing Indonesia dipengaruhi oleh memburuknya dukungan infrastruktur serta faktor korupsi dan suap yang menghalangi kemudahan memulai bisnis. Meskipun kondisi makroekonomi meningkat di tengah kekhawatiran inflasi, namun kondisi fisik infrastruktur seperti pelabuhan tidak menunjukkan perbaikan dan pasokan listrik kian tidak dapat diandalkan. Sejak 2005, *World Economic Forum* mendasarkan analisis daya saing ekonomi 142 negara di dunia dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*. Indeks ini merupakan indikator komprehensif yang mengukur pondasi mikroekonomi dan makroekonomi sebuah negara untuk menentukan daya saing. Berdasarkan klasifikasi GCI, daya saing Indonesia semakin bergantung kepada elemen-elemen yang lebih kompleks karena Indonesia mulai memasuki tahap pertumbuhan ekonomi yang didorong efisiensi pasar. *World Economic Forum* mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas sebuah negara. Produktivitas mendasari tingkat kemakmuran yang bisa dicapai sebuah negara. Produktivitas juga menentukan *return* yang didapat investor. Sementara investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan. Semakin kompetitif maka negara semakin cepat tumbuh dari waktu ke waktu. Sebagaimana disebutkan di depan, peringkat daya saing dibentuk oleh 12 pilar, yang dikelompokkan ke dalam

3 kelompok, yaitu Kelompok Persyaratan Dasar, Kelompok Penopang Efisiensi, dan Kelompok Inovasi dan Kecanggihan Bisnis. Untuk Indonesia (Lihat Tabel 4) dari tiga kelompok pilar daya saing, hanya Kelompok Persyaratan Dasar yang mengalami kenaikan peringkat, yaitu naik 7 tingkat (dari ke 60 menjadi ke 53). Dua kelompok lain, yaitu Kelompok Penopang Efisiensi dan Kelompok Inovasi dan Kecanggihan Bisnis, mengalami penurunan peringkat yang cukup besar, yaitu masing-masing -5 dan -4. Sedangkan faktor penghambat daya saing Indonesia masih didominasi oleh intensitas masalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien (Lihat Tabel 5).

Tabel 4. Perubahan Peringkat Daya Saing Indonesia menurut Pilar Tahun 2011

No	Pilar	Peringkat 2011	Peringkat 2010	Perubahan
	Kelompok Persyaratan Dasar	53	60	7
1	Institusi	71	61	-10
2	Infrastruktur	76	82	6
3	Makroekonomi	23	35	12
4	Kesehatan dan pendidikan dasar	64	62	-2
	Kelompok Penopang Efisiensi	56	51	-5
5	Pendidikan tinggi	69	66	-3
6	Efisiensi pasar barang	67	49	-18
7	Efisiensi pasar tenaga kerja	94	84	-10
8	Pasar keuangan	69	62	-7
9	Kesiapan teknologi	94	91	-3
10	Besaran pasar	15	15	0
	Kelompok Inovasi dan Kecanggihan Bisnis	41	37	-4
11	Kecanggihan bisnis	45	37	-8
12	Inovasi	36	36	0

Sumber: *World Economic Forum 2011*

Tabel 5. Faktor-faktor Penghambat Daya Saing

No	Faktor Bisnis	Intensitas Masalah
1	Korupsi	15.4
2	Birokrasi pemerintah yang tidak efisien	14.3
3	Infrastruktur yang tidak memadai	9.5

4	Ketidakstabilan politik	7.4
5	Akses pada pembiayaan	7.2
6	Tenaga kerja terdidik yang memadai	6.3
7	Etika kerja yang buruk	6.2
8	Ketidakstabilan pemerintah	6.1
9	Inflasi	6.1
10	Peraturan pajak	6.0
11	Tingkat pajak	4.2
12	Peraturan buruh yang membatasi	3.6
13	Kriminalitas dan pencurian	2.7
14	Kesehatan umum yang buruk	2.5
15	Peraturan mata uang asing	2.3

Sumber: *World Economic Forum 2011*

III. KAJIAN TEORITIS DAYA SAING

Teori Porter tentang daya saing nasional berangkat dari keyakinannya bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparative tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing/*competitive advantage* (CA) jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh CA karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaan dalam nilai-nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya memberi kontribusi pada keberhasilan dalam persaingan. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produk. Selanjutnya Porter mengajukan Diamond Model (DM) yang terdiri dari empat determinan (faktor – faktor yang menentukan) National Competitive Advantage (NCA). Empat atribut ini adalah: *factor conditions*, *demand conditions*, *related and supporting industries*, dan *firm strategy, structure, dan rivalry*. *Factor conditions* mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal dan infrastruktur. Argumen Porter, kunci utama faktor produksi adalah diciptakan bukan diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan sumber daya (*factor disadvantage*) seringkali membantu negara menjadi kompetitif. Terlalu banyak (sumber daya) memiliki kemungkinan disia-siakan, ketika langka dapat mendorong inovasi. *Demand conditions*, mengacu pada tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing. Pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk-produk superior, hal ini didorong oleh adanya permintaan barang dan jasa

berkualitas serta adanya kedekatan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. *Related and Supporting Industries*, mengacu pada tersedianya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan, hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan. Porter mengembangkan model dari faktor kondisi semacam ini dengan *industrial clusters* atau *agglomeration*, yang memberi manfaat adanya *potential technology knowledge spillover*, kedekatan dengan konsumen sehingga semakin meningkatkan *market power*. *Firm strategy, Structure and Rivalry*, mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada industri tertentu. Faktor Strategy dapat terdiri dari setidaknya dua aspek: pasar modal dan pilihan karir individu. Pasar modal domestik mempengaruhi strategi perusahaan, sementara individu seringkali membuat keputusan karir berdasarkan peluang dan prestise. Suatu negara akan memiliki daya saing pada suatu industri di mana personel kuncinya dianggap prestisius. Struktur mengikuti strategi dan dibangun guna menjalankan strategi. Intensitas persaingan (*rivalry*) yang tinggi mendorong inovasi. Porter juga menambahkan faktor lain; peran pemerintah dan chance, yang dikatakan memiliki peran penting dalam menciptakan NCA. Peran dimaksud, bukan sebagai pemain di industri, namun melalui kewenangan yang dimiliki memberikan fasilitasi, katalis, dan tantangan bagi industri. Pemerintah menganjurkan dan mendorong industri agar mencapai level daya saing tertentu. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan insentif berupa subsidi, perpajakan, pendidikan, fokus pada penciptaan dan penguatan *factor conditions*, serta menegakkan standar industri. Poin utama dari DM, Porter mengemukakan model penciptaan daya saing yang *self-reinforcing*, di mana persaingan domestik menstimulasi tumbuhnya industri dan secara bersamaan membentuk konsumen yang maju (*sophisticated*) yang selalu menghendaki peningkatan dan inovasi. Lebih jauh DM juga mempromosikan industrial cluster. Kontribusi Porter menjelaskan hubungan antara *firm-industry-country*, serta bagaimana hubungan ini dapat mendukung negara dan sebaliknya. Dalam perkembangan selanjutnya teori DM Porter ini banyak mendapat kritik dari peneliti dan akademisi, antara lain ada yang mengatakan bahwa DM dibangun dengan pendekatan studi kasus dari 10 negara maju sehingga cenderung hanya dapat diaplikasikan untuk Negara-negara maju saja. Kritik ini mengatakan DM Porter agak sulit diterapkan di negara berkembang dan atau negara kecil yang *domestic demand*-nya juga kecil. Selain itu, argumen Porter bahwa hanya arus keluar *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berguna bagi penciptaan CA, sementara arus masuk FDI tidak serta merta meningkatkan domestic CA, argumen ini dikatakan hanya didukung oleh bukti empiris yang sangat sedikit, pada kenyataannya, arus masuk FDI ikut pula berperan dalam meningkatkan *factor conditions*. Kritik lain, DM tidak secara spesifik membahas peran *Multi National Company* (MNC), padahal ada bukti yang menunjukkan bahwa sukses DM juga dipengaruhi oleh eksistensi bisnis internasional.

Rugman dan D'Cruz memperkenalkan Double Diamond Model (DDM). Perbedaan utama dari DDM dan DM terletak pada upaya Rugman dan D'Cruz mengisi kekosongan (gap) yang ditinggalkan oleh Porter, yakni pada *international competitiveness*. DDM menjelaskan bagaimana suatu interdependensi ekonomi (regionalisasi dan globalisasi) mempengaruhi interaksi suatu industri dan bahkan sampai ke level perusahaan. Dalam DDM, faktor penentu CA tidaklah semata berasal dari negara asal (*local environment*) melainkan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang di negara lain.

Cho memperkenalkan *Nine-Factor Model* Cho (1994) berargumen bahwa Model Diamond Porter memiliki keterbatasan ketika diaplikasikan di Negara-negara sedang membangun seperti Korea. Cho menambahkan pentingnya peran faktor manusia dan perbedaan type faktor fisik dalam menjelaskan daya saing nasional. Faktor manusia termasuk pekerja, politisi/ birokrat, pengusaha, dan profesional. Faktor fisik termasuk sumber daya nasional yang dimiliki, permintaan domestik, industri pendukung dan terkait, serta lingkungan bisnis lainnya. Satu faktor luar, peluang, ditambahkan untuk melengkapi sebagai paradigma baru dalam model sembilan-faktor (NFM). Perbedaan antara NFM dan DM terletak pada pembagian faktor dan dalam penambahan faktor-faktor baru. DM memasukkan sumber daya alam dan pekerja ke dalam *factor conditions*, di pihak lain NFM menempatkan sumber daya alam ke dalam kelompok sumber daya yang sudah dimiliki (*endowed resources*), sementara faktor pekerja memiliki kesamaan. Daya saing internasional diperoleh melalui faktor manusia yang mampu memobilisasi faktor fisik. Daya saing hanya berarti di antara negara-negara yang memiliki kesamaan *comparative advantage* yang bersaing dalam industri sejenis. Dengan kata lain, posisi daya saing relatif di antara negara-negara sejenis dalam tahapan pembangunan ekonomi, namun bukan di antara semua negara di dunia, merupakan elemen penting bagi daya saing sebuah negara.

Richard Vietor menentang How Countries Compete? Pemerintah perlu membantu negara dalam persaingan. Negara bersaing untuk berkembang, hal ini merupakan salah satu hasil globalisasi. Negara bersaing untuk memperoleh pasar, teknologi, ketrampilan dan investasi. Negara bersaing untuk tumbuh dan meningkatkan standar hidup rakyatnya, mengurangi kemiskinan, mengakomodasi urbanisasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam lingkungan yang kompetitif ini, adalah pemerintah, secara bervariasi, yang menyediakan keunggulan *distinctive* kepada perusahaan berupa: tingkat tabungan yang tinggi dan bunga rendah bagi investasi, perlindungan hak cipta dan *good governance*, tenaga kerja yang komit, termotivasi dan paham teknologi, tingkat inflasi yang rendah, serta pasar domestik yang tumbuh dengan cepat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan, memastikan berfungsinya kontrak (perdata), mengelola ekonomi makro, meminimalkan resiko, serta menyiapkan kebijakan industri. Semua ini dilakukan dengan menciptakan dan melestarikan berbagai institusi – politik, sosial, dan ekonomi melalui kemampuan masyarakat dalam berinteraksi

dan bersaing. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam kebijakan fiskal dan moneter yang keduanya secara bersama berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, namun juga dalam pembuatan kebijakan di sektor perumahan, pendidikan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta pertahanan. Di pihak lain perusahaan membutuhkan nilai tukar yang kompetitif, perlindungan hak cipta, distribusi pendapatan yang seimbang, sesedikit mungkin korupsi, beberapa kebijakan hambatan perdagangan (*trade barriers*). Semua ini dapat dilayani kebijakan pemerintah yang efektif, oleh karenanya strategi pemerintah sangat penting dan setiap birokrat pemerintah bertanggung jawab terhadap terciptanya kebijakan yang efektif tersebut. Vietor mengajukan tiga kerangka analisis. Pertama, memahami kondisi saat ini, manajer harus memiliki kemampuan untuk menganalisa strategi dan struktur organisasi *nation-state*, dalam hal bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan konteks sosial politik dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja ekonomi. Kedua, karena manajer pada umumnya lebih tertarik pada “kemana arah pembangunan dari pada di mana posisi negara pada saat ini”, maka perlu dipikirkan tentang masa depan, dalam konteks ini akan bermanfaat untuk mempelajari *trajectory* atau *roadmap* rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Meskipun disadari bahwa RPJP dapat berubah sewaktu-waktu karena perang, kelangkaan pangan atau energi, huru-hara politik, atau turbulensi ekonomi namun ketika perubahan mendadak tidak terjadi, pelaku ekonomi dapat memperkirakan kinerja dan indikator-indikator ekonomi yang dapat menjadi acuan bagi keputusan investasi dan bisnis. Ketiga, dengan tersedianya RPJP, pelaku ekonomi dapat merancang skenario sederhana tentang apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek ke depan, dengan mengajukan alternatif pesimis atau optimis.

Teori DM Porter menjelaskan bagaimana suatu negara dapat mencapai NCA, diamon model yang digunakan sebagai *tools of analysis* mendapat kritik dari akademisi dan peneliti lain. Arguman pengkritik dapat dipahami karena mereka melihat dari perspektif lain yang lebih luas berdasar data yang berbeda dari yang digunakan Porter ketika mengembangkan model diamond. Perbedaan – perbedaan ini tidak mengurangi esensi dari penciptaan NCA yang berada pada firm dan industri. Baik Porter, Rugman, Cho dan Vietor memiliki kesepahaman tentang peran pemerintah dalam menciptakan daya saing nasional.

IV. MEMBANGUN DAYA SAING NASIONAL MELALUI KEMANDIRIAN

Seperti kita ketahui bahwa peran pemerintah dalam menciptakan daya saing nasional sangatlah diperlukan. Untuk itu dalam meningkatkan daya saing nasional pemerintah perlu memprioritaskan menyelesaikan intensitas permasalahan besar yang dapat menghambat daya saing nasional. Disamping hal tersebut pemerintah perlu pula mengejar kemandirian di segala bidang yang relevan dengan pilar-pilar

dalam meningkatkan daya saing nasional. Kemandirian yang benar pada era seperti sekarang adalah tak terperosok dalam isolasionisme ekonomi atau menolak interdependensi ekonomi internasional. Pada saat yang sama negara manapun harus mengambil langkah sistematis dan terencana untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri. Terdapat beberapa langkah konkret yang mesti dapat diambil untuk meningkatkan daya saing nasional. Pertama, optimalisasi pasar domestik. Berbagai negara mulai mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya beli dalam negeri. Melakukan kemandirian inovasi pasar dalam negeri sendiri. Dalam banyak kasus, Negara lain dengan cerdiknyanya, menutup pasar dalam negeri bagi orang luar. Indonesia sudah merasakan bagaimana asas resiprokal dunia perbankan tak berlaku di beberapa negara kendati kita sudah membuka besar-besaran keran investasi perbankan asing di negara ini. Bank-bank nasional kita tidak mudah membuka cabang di Malaysia ataupun di China. Sementara bank kedua negara itu merajalela sampai ke negara kita. Ini menunjukkan masing-masing negara berupaya agar pasar domestiknya sedapat mungkin digarap oleh kemandirian industri di dalam negeri. Kedua, alokasi energi bagi kepentingan dalam negeri. Setelah kita menjadi net importir minyak, batu bara dan gas masih tersedia. Sayangnya, sebagian besar energi kita yang masih ada ini belum diarahkan untuk kepentingan memperkuat kemandirian industri dalam negeri. Industri-industri kita banyak yang tidak mampu bersaing lagi dengan produk luar yang notabene dihidupkan oleh gas dan batu bara dari Indonesia. Fakta ini menunjukkan negara-negara importir gas kita berhasil melakukan efisiensi kendati hampir semua bahan bakunya diimpor. Dibutuhkan kebijakan energi untuk memihak kemandirian industri dalam negeri. Ketiga, meningkatkan produktivitas di tingkat industri (*industry level*). Bila energi nasional kita cukup, langkah berikut adalah perhatian yang teramat sangat mengangkat *competitive advantage* sesuai dengan kompetensi dan sumber daya masing-masing yang dimiliki. Disini mencakup bagaimana mengamankan kebutuhan bahan baku industri serta meningkatkan kemandirian inovasi. Persaingan yang teramat ketat di tingkat global membuat industri dalam negeri harus melakukan kemandirian inovasi agar bisa bersaing sambil perlahan melakukan transformasi dari *herited-competitiveness* menjadi *created-competitiveness*, di mana industri tak lagi bergantung pada ketersediaan dan berlimpahnya sumber daya alam. Desentralisasi pemerintahan membawa angin segar bagi iklim demokrasi. Distribusi anggaran juga kemudian mulai merata. Namun, yang harus diantisipasi adalah desentralisasi membuat arah industri semakin tidak fokus. Dampak desentralisasi ini membutuhkan kemampuan koordinasi yang kuat dan efektif atas fokus industri pada tingkat kepemimpinan nasional. Keempat, mendesain sistem insentif dalam hal start-up bisnis, inovasi, investasi, kemudahan perizinan, prosedur ekspor, dan insentif pajak dalam membangun basis industri nasional. Kita masih ingat International Finance Corporation (IFC) bersama Bank Dunia merilis hasil penelitian tentang daya saing kota-kota di Indonesia terkait dengan kemudahan berusaha pada 2010. Bandung

dan Yogyakarta terpilih sebagai kota yang nyaman untuk berusaha berdasarkan kemudahan mendirikan usaha, kemudahan mengurus izin pendirian usaha, dan pendaftaran properti. Herannya, secara nasional Indonesia menempati posisi di belakang yakni ke-122 dari 183 negara yang disurvei, lebih buruk dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura (1), Thailand (12), dan Malaysia (23). Ini menunjukkan daya saing kita masih sebatas gerakan lokal yang sporadis dan dimotori pemimpin-pemimpin daerah yang memperoleh banyak pencerahan akan pentingnya membangun daya saing nasional pada era keterbukaan dan pasar bebas. Oleh sebab itu, meski semangat otonomi daerah dapat membawa angin perubahan dan pemerataan, dibutuhkan sentralisasi kebijakan dan kampanye daya saing pada level nasional. Riak-riak kebangkitan daerah meningkatkan daya saing daerah mesti disambut oleh pusat dan dikelola dengan berbagai tindakan dan pendekatan secara makro yang efektif seperti insentif fiskal, moneter, peraturan perundang-undangan, bunga kredit, dan kepastian hukum. Kelima, dukungan dari sektor keuangan. Daya saing industri makin lemah dengan kurang kondusifnya dukungan sektor keuangan. Industri masih mengeluhkan tingginya suku bunga pinjaman serta masih rendahnya alokasi kredit investasi. Kalangan perbankan sendiri merasa tak nyaman dengan *undisbursed loan* yang sudah melewati Rp470 triliun dan trennya terus naik. Perbankan juga masih dibayangi oleh persepsi risiko yang tinggi. Pada saat yang sama, bank-bank masih membukukan pertumbuhan laba yang fantastis di atas 28%, ditopang sektor konsumsi. Keenam, industri olahan masih rendah. Akibat berbagai persoalan, industri olahan kita sulit berkembang, padahal potensinya sangat besar. Nilai tambah dari hasil bumi kita pun jadi hilang. Sebagai contoh, kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kita harus meningkatkan pengolahan CPO dan meningkatkan diplomasi dagang ke berbagai negara. Meski memiliki lahan sawit lebih kecil dari Indonesia, Malaysia mampu mengembangkan industri olahan permintaan CPO lebih dominan daripada produk turunannya. Caranya, Malaysia membangun industri olahan CPO di negara-negara tujuan ekspor. Harus ada kebijakan secara sistematis dan terencana bagaimana menjadikan CPO sebagai kontributor utama bagi kekuatan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi tawar di dunia internasional. Ketujuh, kemandirian membangun ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur tak hanya kunci untuk memenangi persaingan global, tetapi juga penting untuk meningkatkan produktivitas di semua sektor. Banyak proyek infrastruktur mangkrak karena berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya keuangan akibat krisis keuangan global 2008 atau masalah pembebasan lahan. Kedelapan, mengangkat status kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada era perdagangan bebas seperti sekarang, keberpihakan tidak bisa dinafikan bila UMKM kita hendak diangkat ke tingkat yang lebih bermartabat dan bersaing. Daya saing UMKM kita masih lemah dibandingkan dengan UMKM China yang rata-rata mampu menembus pasar internasional. UMKM terus-terusan menjadi komoditas politik. Kita juga belum menemukan formula atau katalisator yang

pakem untuk menggerakkan UMKM ke level industri menengah ke atas. Kesembilan, daya saing kita akan ditentukan oleh distribusi ekonomi yang berkeadilan untuk setiap daerah. Desentralisasi politik dan demokrasi telah menjadi *entry point* tersendiri bagi Indonesia di hadapan dunia internasional. Produk turunan desentralisasi dan demokratisasi ini adalah stabilitas politik yang bagus secara nasional. Belum ada dalam sejarah negara manapun di mana suatu negara berhasil melakukan pemilihan kepala daerah lebih dari 400 kali dalam satu periode. Dan terakhir untuk membangun daya saing memang bukanlah resep instan. Negara-negara maju semacam Finlandia, Singapura, China, Jepang, dan Amerika Serikat telah menginvestasikan waktu dan sumber daya sejak lama. Kita harus punya komitmen yang tinggi untuk mengejar kemandirian untuk membangun daya saing nasional dari semua elemen bangsa yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kekuatan sipil masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, penegak hukum, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Apalagi era globalisasi seperti sekarang ini, harkat dan martabat sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan kemandirian industri suatu negara serta pengaruhnya terhadap negara lain.

V. PENUTUP

Peran pemerintah dalam menciptakan daya saing nasional sangatlah diperlukan. Untuk meningkatkan daya saing nasional pemerintah perlu memprioritaskan menyelesaikan intensitas permasalahan besar yang dapat menghambat daya saing nasional yaitu korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Disamping hal tersebut pemerintah perlu pula mengejar kemandirian di segala bidang yang relevan dengan pilar-pilar dalam meningkatkan daya saing nasional. Kemandirian yang benar adalah tak terperosok dalam isolasionisme ekonomi atau menolak interdependensi ekonomi internasional.

Terdapat beberapa langkah konkret yang mesti dapat diambil untuk meningkatkan daya saing nasional yaitu: 1) Optimalisasi pasar domestik; 2) Prioritas alokasi energi bagi kepentingan industry dalam negeri; 3) Meningkatkan produktivitas di tingkat industri; 4) Mendesain sistem insentif dalam membangun basis industri nasional; 5) Memperbesar dukungan dari sektor keuangan kepada industri dalam negeri; 6) Meningkatkan kemampuan industri olahan; 7) Kemandirian membangun ketersediaan infrastruktur; 8) Mengangkat status kemandirian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 9) Distribusi ekonomi yang berkeadilan untuk setiap daerah; dan 10) Harus punya komitmen yang tinggi untuk mengejar kemandirian dalam membangun daya saing nasional dari semua elemen bangsa yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kekuatan sipil masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, penegak hukum, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Tata Samiadji, 2009, Skenario Global Pengembangan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional, *Online Bulletin Tata Ruang*.
- <http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/meningkatkan-daya-saing-industri-nasional-menghadapi-persaingan-global/>
- <http://regionalworkshop.star-sdp.org/materi/harikedua/4.Reformasi%20Birokrasi%20-%20Meningkatkan%20Daya%20Saing%20Nasiona%28Pande%20R%20Silalahi%29.pdf>
- <http://economy.okezone.com/read/2009/12/16/279/285463/kompetisi-membangun-daya-saing-nasional>
- <http://www.bappenas.go.id/node/116/2459/keterbukaan-informasi-akan-meningkatkan-daya-saing-nasional/>
- <http://www.neraca.co.id/2011/06/12/menjaga-daya-saing-unggul/>
- <http://the-marketeers.com/archives/dari-wef-untuk-indonesia.html>
- <http://economy.okezone.com/read/2009/12/16/279/285463/kompetisi-membangun-daya-saing-nasional>
- Herry Darwanto, 2011, Analisis Peringkat Daya Saing Indonesia 2008-2011, BAPPENAS.
- Koran Jakarta, Bambang Tata Samiadji, 13 Oktober 2011, Daya Saing Nasional Mesti Digenjot, Digital Edition.
- Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, dan robert E. Hoskisson, 2001, *Manajemen Strategi: Daya Saing Dan Globalisasi*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nurdin Tampubolon, 2010, Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing dalam rangka Ketahanan Nasional, *Makalah Seminar*.
- Porter, Michael E., 1993, *Competitive Advantage*, USA: Collier Macmillan Publisers.
- Porter, Michae E., 1996, "What is Strategy?", *Harvard Business Review*, p.61-79.
- World Economic Forum* (WEF), 2009, The Global Competitiveness Report 2009-2010.

World Economic Forum (WEF), 2010, The Global Competitiveness Report 2010-2011.

World Economic Forum (WEF), 2011, The Global Competitiveness Report 2011-2012.

World Economic Forum (WEF), 2011, The Indonesia Competitiveness Report 2011.